



---

**Eksploitasi Ruang Ketakutan: Analisis Peran Elit Politik dan Kelompok Penekan  
Dalam Upaya Sekuritisasi Islamofobia Melalui Kebijakan Imigrasi Perancis**

**Duanda Gumilar**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website  
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip.undip.ac.id](mailto:fisip.undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*France is the fourth largest immigrant recipient in Europe and most of them are Muslim. Thus, France is currently ranked as the largest number of Muslim in Europe. This causes domestic social and political conflict in the form of violence and discrimination known as Islamophobia. This study aims to analyze on how the emerge of Islamophobia became a domestic threat through France immigration policy. Through the concept of linguistic constructivism and securitization theory, this study try to analyze the development of Islamophobia in France. This study argues that France pressure group and political elite play an active role in the process of politicizing Islamophobia as a security issue, so that Islamophobia institutionalized by the France government into France immigration policy such as prohibition of religious symbols and immigrant restriction. However, it is found a bottom-up securitization process influenced by the public opinion.*

**Keywords:** *Islamophobia, pressure groups, political elite, politicization, securitization*

**PENDAHULUAN**

Perancis merupakan salah satu negara tujuan utama imigran dimulai sejak Perang Dunia (1914-1918). Imigran datang ke Perancis dengan tujuan utama mencari lapangan pekerjaan sebagai buruh karena saat itu Perancis berada pada kondisi depresi ekonomi—kekurangan tenaga kerja pasca destruksi perang (Pabottingi, 2008). Kemudian Perang Dunia II dan Revolusi Industri semakin meningkatkan gelombang imigran ke Perancis. Imigran asal Aljazair, Maroko, Tunisia, Portugal, Polandia, dan Turki merupakan pendatang terbesar yang masuk ke Perancis dan mayoritas dari mereka beragama Islam (Arighi, 2017). Jumlah imigran Muslim asal Afrika yang terus menerus meningkat menjadikan populasi Muslim di Perancis semakin bertambah. Hingga Perancis menjadi negara dengan pemeluk Islam terbesar di Eropa dengan jumlah 5,7 juta jiwa pada tahun 2016 atau sebesar 8,8% dari total penduduk Perancis disusul oleh Jerman dengan empat juta jiwa (Guardian, 2017). Interaksi imigran dan warga Perancis terjalin harmonis hingga peristiwa teror terbesar terjadi pada 11 September 2001 di Amerika Serikat atau dikenal dengan peristiwa 9/11. Sikap dan persepsi masyarakat Perancis terhadap imigran berubah negatif karena masyarakat menganggap Islam yang bertanggung jawab atas peristiwa terorisme tersebut (Pabottingi, 2008). Ketakutan-

ketakutan tersebut dikatakan sebagai wujud Islamofobia masyarakat Perancis akan imigran khususnya imigran Muslim. Hingga pada 2004, Islamofobia berada pada titik klimaks—menjadi isu yang mengancam keamanan nasional—sehingga pemerintah Perancis berusaha melembagakan Islamofobia melalui berbagai kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri dalam upaya sekuritisasi. Keberadaan *The Collective Against Islamophobia in France* atau *Collectif Contre L'Islamophobie en France* (CCIF) merupakan organisasi pejuang hak asasi manusia dengan misi memerangi Islamofobia dan diskriminasi yang diakibatkannya (Islamophobie, 2000). Organisasi tersebut didirikan sebagai respon banyaknya fenomena Islamofobia di Perancis berwujud diskriminasi. Diskriminasi paling banyak dilakukan terhadap wanita Muslim dengan persentase 74% terjadi di instansi dan 64% di layanan publik pada 2015 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya (Islamophobie, 2016). Berdasarkan data, CCIF melaporkan pada kurun waktu 2003 hingga 2004 saja setidaknya terdapat 182 tindakan Islamofobik berupa penyerangan fisik terhadap individu, perusakan masjid, perusakan makam, dan penutupan proyek yang berkaitan dengan keagamaan Islam (Euro-Islam.info, 2018). Setelah peristiwa penembakan Charlie Hebdo 2015, persentase meningkat sebesar 110% atau peningkatan dua kali lipat dari angka pada 2014 (CNN, 2015).

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai analisis bagaimana kemunculan Islamofobia hingga proses politisasi Islamofobia menjadi sebuah ancaman domestik sehingga pemerintah berupaya melakukan sekuritisasi melalui kebijakan terhadap imigran khususnya imigran Muslim. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian terdahulu dengan menawarkan sudut pandang berbeda yaitu melalui kajian konstruktivisme. Menggunakan sudut pandang Konstruktivisme melalui teori Sekuritisasi dan Konstruktivisme Linguistik, penulis akan menganalisis peran figur politik dan kelompok penekan dalam politisasi hingga sekuritisasi Islamofobia melalui kebijakan imigrasi Perancis. Konstruktivis meyakini ada hubungan timbal-balik antara agen dan struktur yang menggunakan bahasa sebagai perantara. Austin berpendapat bahwa bahasa memiliki dua makna yaitu mendeskripsikan dan atau menginstruksikan (Rosyidin, 2015: 100). Artinya, terdapat keinginan pengucap agar pendengar melakukan tindakan sesuai instruksi yang diberikan pengucap. Ole Waever menekankan keberhasilan proses sekuritisasi berada pada penerimaan aktor akan isu tersebut sehingga isu keamanan tersebut mampu diwujudkan melalui suatu tindakan tertentu (Buzan et al dalam Skidmore, 1999).

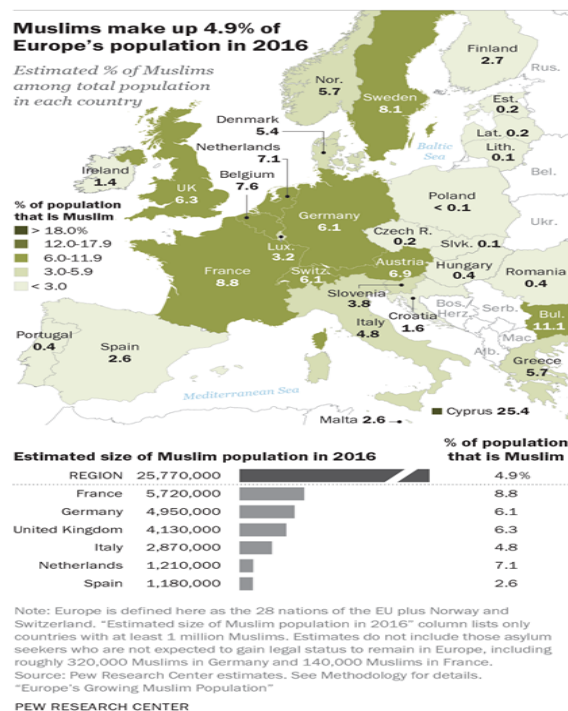
Suatu isu dapat dikategorisasi sebagai isu keamanan setelah aktor berhasil melakukan pidato sekuritisasi. Keamanan berkaitan dengan *speech act* dimana apa yang suatu aktor tuturkan merupakan tindakan yang dilakukan aktor tersebut (Balzacq et al., 2015). Semakin banyak aktor yang mengangkat isu ancaman maka semakin rentan pula masyarakat akan segregasi dan sensitivitas konflik (Baldwin dalam Rou, 2019). Secara singkat, teori sekuritisasi menganalisis bagaimana suatu isu memperoleh status sebagai isu keamanan akibat dari proses intersubjektivitas. Setelah isu ancaman terbentuk, upaya sekuritisasi segera dilakukan pembuat kebijakan atau aktor dengan melakukan cara apapun untuk menanggulangi ancaman (Rou, 2019).

Penelitian ini berargumen bahwa figur politik dan kelompok penekan (*pressure group*) Perancis berperan aktif dalam proses politisasi Islamofobia menjadi isu keamanan sehingga, Islamofobia dilembagakan pemerintah Perancis ke dalam kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri melalui pelarangan simbol keagamaan hingga pembatasan imigran khususnya imigran Muslim sebagai upaya sekuritisasi.

## PEMBAHASAN

Sejarah datangnya imigran ke Eropa dibagi ke dalam tiga perodesasi; tahun 1950 hingga 1974, 1974 hingga 1980-an saat krisis minyak dunia, dan 1990 hingga sekarang (Mol dan Valk, 2016). Periode pertama, yaitu 1950-1974, setelah Perang Dunia II Eropa mengalami kenaikan produksi secara masif dalam rangka rekonstruksi ekonomi pasca perang. Kesempatan tersebut memungkinkan datangnya buruh dari negara-negara sekitar Eropa seperti Turki, Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Pada periode pertama ini, terjadi mutualisme ekonomi antara negara penerima imigran dan imigran dari berbagai negara. Periode kedua, antara tahun 1974 hingga 1980-an. Pada periode tersebut terjadi krisis minyak dunia yang berimbas secara langsung pada perekonomian Eropa. Krisis ekonomi yang mengikuti guncangan harga minyak menyebabkan peningkatan pengangguran. Warga Perancis melihat imigran sebagai penyebab utama kurangnya kesempatan kerja, dan para politisi mulai bertindak untuk menghentikan imigrasi. Pada periode ini, mulai muncul konflik sosial berupa xenofobia antara penduduk Eropa dan imigran berwujud diskriminasi, intimidasi, hingga kekerasan (Mol dan Valk, 2016). Jumlah imigran yang masuk ke kawasan Eropa pada tahun 2014 tercatat sejumlah 280.000 jiwa meningkat pada tahun 2015 sebesar 1,8 juta jiwa (BBC, 2016) dan data terbaru pada 2017 mencatat jumlah imigran non-Eropa saja mencapai 2,4 juta jiwa di kawasan Eropa (Eurostat, 2019). Tahun 2015 dikatakan sebagai tahun yang problematis bagi Eropa dikarenakan gelombang imigran yang tak henti mereda. Dimulai sejak peristiwa *Arab Spring* dan terus meningkatnya imigran asal Afrika menyebabkan Eropa di bawah Uni Eropa berpikir untuk mengkaji ulang kebijakannya terhadap imigran. Dilema melanda negara-negara Eropa mengenai keberadaan imigran.

Gambar 1. Populasi Muslim di Eropa Tahun 2016



Sumber: Pew Research Center, 2017

Muncul Perancis sebagai negara terdampak imigran yang menghadapi permasalahan domestik cukup pelik. Dominasi dan eksistensi imigran Muslim di Perancis cukup mengkhawatirkan masyarakat asli Perancis khususnya eksistensi imigran Muslim dalam bidang ekonomi. Persaingan kesempatan kerja merupakan perih utama munculnya konflik sosial berupa diskriminasi dan ketakutan terhadap masyarakat asing atau dikenal dengan Xenofobia. Xenofobia berkembang dikarenakan faktor internal yang muncul dari dalam lingkungan Perancis itu sendiri salah satunya keterlibatan politik Perancis dengan negara-negara konflik di Timur Tengah. Serangkaian peristiwa teror yang melanda Perancis sejak 1995 hingga saat ini turut serta mengembangkan ketakutan masyarakat Perancis terhadap atribut ke-Islaman yang dimiliki imigran Muslim. Terlebih, setelah peristiwa teror 9/11 di Amerika Serikat, masyarakat Perancis semakin menginginkan imigran Muslim meninggalkan wilayah Perancis karena rasa takut akan hal-hal yang berkaitan dengan Islam atau dikenal dengan Islamofobia. Muncul Marine Le-Pen sebagai figur politik dan PEGIDA sebagai kelompok penekan yang paling berpengaruh di Perancis. Marine Le-Pen dan PEGIDA berperan penting dalam politisasi xenofobia dan Islamofobia ke ranah publik dengan seruan anti-Islam. Keduanya memiliki misi memerangi imigran Muslim yang dinilai telah mengganggu kemurnian nilai-nilai Perancis.

Marine Le-Pen dengan gerakan *de-demonisasi* memiliki visi utama merevitalisasi Republik Perancis dengan seruan anti-semit dan Islamofobia. Pemikiran populisnya berhasil menggiring opini masyarakat Perancis untuk mengubah persepsi positif terhadap imigran Muslim. Tujuan dedemonisasi yaitu memisahkan perih agama dan kehidupan sosial sesuai dengan nilai sekularisme (Carvalho, 2018).

*“We support putting a stop to immigration. ... we have millions of unemployed and cannot afford any more immigration. Where are they supposed to live? It is not viable. We’ve got Islamists in our country. The demands are incessant. We are being submerged by a flood of immigrants that are sweeping all before them. There are prayers in the street, cafes that ban women and young women who get threatening looks if they wear a skirt. I will say when I become president that this is not the French way. ... If we carry on like this, the whole of France will become a gigantic no-go zone. ... A multicultural society is a society that has multiple conflicts. Expulsion. It’s the law, it’s French law.”* (New York Times, 2017)

Dalam pidatonya tersebut Marine Le-Pen menyatakan kondisi imigrasi Perancis saat ini kacau dikarenakan gelombang imigran yang terus membanjir dari waktu ke waktu. Hal tersebut saat ini telah menjadi ancaman serius bagi nasional Perancis disebabkan multikulturalisme yang mendorong adanya konflik sosial dalam masyarakat. Terlebih, dominasi imigran Muslim dinilai tidak selaras dengan nilai-nilai budaya Perancis. Lebih jauh, Marine Le-Pen menganggap imigran hanya mengais keuntungan dari fasilitas yang dimiliki Perancis tanpa mau berintegrasi dengan kehidupan sosial-politik Perancis. Dalam debat presiden putaran kedua pada April 2017 melawan Emmanuel Macron, Marine Le-Pen secara tegas menjanjikan kebijakan nasionalis proteksionis dengan visi mengurangi gelombang imigran Muslim yang datang ke Perancis serta mengembalikan budaya fundamental Perancis yaitu sekularisme.

Gerakan *de-demonisasi* mendapat respon cukup baik dari masyarakat Perancis dibuktikan dengan terus meningkatnya suara Front Nasional sebagai partai pengusung Marine Le-Pen pada pemilihan presiden tahun 2012 dan 2017. Pada tahun 2017 Marine Le-Pen mendapat 37,30% suara melesat jauh dibanding 18% suara yang ia peroleh pada pemilu tahun 2012.

Selain itu, muncul PEGIDA dan Front National sebagai kelompok penekan berpegaruh di Perancis. Kelompok penekan (*pressure group*) memiliki salah satu fungsi yaitu fungsi korektif. Fungsi korektif didefinisikan sebagai upaya memberikan umpan balik atau *feedback-information* dari kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai (Budiman, 2005). Umpan balik tersebut sebagai komunikasi antara masyarakat kepada pemerintah sehingga dikatakan bersifat *bottom-up*. Upaya *pressure group* berkomunikasi memberikan umpan balik secara damai seringkali kurang didengar oleh pemerintah atau dirasa kurang efektif. Untuk itu, jalan lain biasa ditempuh oleh kelompok penekan dengan melakukan gerakan yang bersifat konfliktual dalam bentuk demonstrasi dengan tujuan memberikan kritik secara langsung kepada pemerintah (Budiman, 2005). Berbagai fungsi *pressure group* antara lain; mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut, memperjuangkan suatu isu tertentu sebagai upaya publikasi dan politisasi sebuah isu, dan memberi referensi politik kepada masyarakat (APSR, 2014).

Front Nasional atau yang kini berganti nama menjadi *Rassemblement National* (*National Rally*) merupakan sayap kanan yang memiliki sentimen nasionalis dan proteksionis. Sentimen tersebut diwujudkan dalam kebijakan proteksi ekonomi dan sikap anti-imigran utamanya imigran non-Eropa. Partai ini didirikan tahun 1972 oleh Jean-Marie Le Pen. Front Nasional yang dipimpin oleh keluarga Le Pen memposisikan diri sebagai perwakilan suara umat Katolik konservatif di Perancis. Front Nasional mempromosikan nilai-nilai konservatif yang tertuang dalam ajaran Katolik seperti pelarangan homoseksual, aborsi, kontrasepsi, dan perceraian (Harvard Divinity School, 2010). Dalam menghadapi fenomena imigran Muslim di Perancis, Front Nasional memposisikan diri menentang nilai-nilai dan ajaran Islam karena dianggap tidak inheren dengan nilai modernitas Perancis (Harvard Divinity School, 2010). Secara tegas Front Nasional menggelorakan gerakan anti-imigran karena menganggap imigran khususnya imigran Muslim mengikis kemurnian ajaran Katolik dalam kehidupan sosial Perancis. Front Nasional dikatakan sebagai kelompok penekan karena aktivitasnya seringkali bersifat memaksa dan menekan pemerintah akan nilai-nilai dan ideologi yang dibawanya. Aksi Front Nasional tidak berhenti pada ruang lingkup struktural dan formal namun juga berupa aksi kekerasan seperti demonstrasi. Selain itu, Front Nasional memiliki simpatisan dari kalangan non-anggota partai atas dasar nilai dan ideologi yang sama. Front Nasional seringkali memanfaatkan masyarakat dalam upaya menekan dan memaksakan kehendaknya pada pemerintah melalui aksi demonstrasi massal dan terbuka.

Di bawah kepemimpinan Jean-Marie Le Pen, Front Nasional mencapai puncak pemilihannya dalam pemilihan presiden 2002, setelah mengumpulkan 16,8% suara pada putaran pertama. Namun, Jean-Marie Le Pen tidak mampu meningkatkan persentase pemilihannya pada putaran kedua dan dikalahkan oleh kandidat Jacques Chirac, yang memperoleh 82,2% suara (Carvalho, 2014). Sedangkan pada masa kepemimpinan Marine Le-Pen, Front Nasional mencapai puncak pemilihan pada pemilihan presiden tahun 2017

pada putaran pertama dengan mendapat 18% suara meningkat pada pemilihan presiden sebelumnya (Carvalho, 2018). Perubahan secara signifikan terjadi ketika masa kepemimpinan Presiden Francois Hollande. Kebijakan imigrasi Francois Hollande dinilai tidak memberikan solusi atas segala permasalahan domestik yang melanda Perancis sehingga Partai Front Nasional mengusung deklarasi gerakan anti-imigran dan anti-semit yang digelorkan oleh pemimpinnya Marine Le-Pen. Tak disangka, Partai Front Nasional cukup mendapat simpati masyarakat Perancis dengan mendapat 37,30% suara pada jajak pendapat putaran kedua pemungutan suara presiden tahun 2017 (Feltesse, 2017).

Selain Front Nasional terdapat PEGIDA (*Patriotische Europäer Gegen die Islamisierung des Abendlandes*) atau *Patriotic Europeans Against the Islamization of the West* dimulai di Dresden, Jerman pada 2014 dengan melakukan demonstrasi menggunakan slogan “*we are the people*” menanggapi krisis imigran yang melanda Eropa khususnya Jerman. Pada 2015 anggota PEGIDA terus bertambah dan mencapai puncak ketika terjadi demonstrasi yang diikuti 20.000 orang sehingga menarik perhatian pers internasional (DW, 2017). Seiring waktu, PEGIDA menyebarkan gerakannya dan melakukan demonstrasi di beberapa kota di Eropa seperti pada 2015 melakukan demonstrasi di Praha, Inggris, Belanda, dan Perancis. Tujuan utama PEGIDA yaitu ingin menekan pemerintah melakukan kontrol yang ketat terhadap imigrasi dalam rangka meminimalisir konflik domestik. Selain itu, PEGIDA dibentuk sebagai wujud nasionalisme menginginkan imigran mampu berasimilasi dengan masyarakat asli Eropa dengan meninggalkan segala atribut dan identitas rasial termasuk identitas Islam (Guardian, 2015).

PEGIDA mulai berkembang di Perancis setelah rentetan peristiwa teror yang menerpa Perancis pada 2015 khususnya peristiwa penembakan Charlie Hebdo 2015 yang dilakukan oleh imigran muslim. Demonstrasi dilakukan di Calais, utara Perancis wilayah imigran bermukim. Dengan seruan “Inggris dan Perancis menangis, itulah bagaimana toleransi berakhir” selain itu, digelorkan pula seruan penolakan terhadap imigran dan Muslim “kami berdemonstrasi menentang Islamisasi Eropa, menentang imigrasi dan invasi Muslim”, “menerima pengungsi namun tidak menerima Muslim” (Reuters, 2014). Demonstrasi tersebut merupakan aksi solidaritas menanggapi berbagai rentetan teror yang melanda Perancis dan Inggris sepanjang tahun 2015. Sejak terbentuknya PEGIDA, pengikutnya terus bertambah hingga berjumlah puluhan ribu (Telegraph, 2016).

*Gambar 2. Demonstrasi Penolakan Mulsim Eropa*



Sumber: (AA News, 2016)

Pengikutnya yang terus meningkat dari waktu ke waktu diiringi gencarnya kelompok tersebut melakukan aksi demonstrasi di seluruh Eropa membuat masyarakat terprovokasi untuk ikut melakukan aksi diskriminasi dan kekerasan terhadap imigran Muslim yang dikenal dengan Islamofobia. Opini publik yang sudah terbentuk akibat provokasi figur politik dan kelompok penekan diekspresikan melalui aksi diskriminasi, kekerasan, ujaran kebencian, dan penistaan agama. Hingga publik Perancis sepakat bahwa keberadaan imigran Muslim di Perancis dinilai sangat mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan Perancis. Hal tersebut ditunjukkan dengan terus meningkatnya angka Islamofobia dari tahun ke tahun diikuti dengan ekspresi kebencian berupa aksi kekerasan terhadap imigran Muslim. Menanggapi hal tersebut, pemerintah memvalidasi opini publik Perancis dengan melakukan langkah sekuritisasi terhadap imigran Muslim dengan membuat kebijakan diskriminatif terhadap imigran Muslim.

Opini publik terbentuk melalui berbagai proses interaksi sosial-politik secara terus menerus sehingga tercipta subjektivitas yang muncul dalam masyarakat. Proses interaksi tersebut dapat melalui berbagai media antara lain pidato, debat, media sosial, poster, hingga propaganda. Pesan yang terus menerus disampaikan oleh subjek akan diterima objek secara langsung maupun tidak langsung melalui interaksi yang terjalin. Terjadi proses awal sekuritisasi dimana aktor dalam hal ini ialah figur politik dan kelompok penekan terus menerus mendeklarasikan suatu isu melalui berbagai media seperti pidato, debat, media sosial, dan poster. Proses tersebut dikatakan oleh Waever sebagai *Speech act* dimana apa yang suatu aktor tuturkan merupakan tindakan yang dilakukan aktor tersebut (Balzacq et al., 2015). Figur politik dan kelompok penekan menganggap Islam dan imigran Muslim merupakan ancaman nasional bagi Perancis sehingga masyarakat menerima isu tersebut sebagai ancaman pula. Sugesti yang terus menerus dilakukan oleh figur politik dan kelompok penekan semakin diterima oleh masyarakat luas sehingga membentuk opini publik. Semakin banyak aktor yang mengangkat isu ancaman maka semakin rentan pula masyarakat akan segregasi dan sensitivitas konflik (Baldwin dalam Rou, 2019). Oleh Waever menekankan keberhasilan proses sekuritisasi berada pada penerimaan aktor akan isu tersebut sehingga isu keamanan tersebut mampu diwujudkan melalui suatu tindakan tertentu (Buzan et al dalam Skidmore, 1999). Masyarakat Perancis berhasil menerima isu ancaman tersebut dan merespon ancaman tersebut melalui tindakan diskriminasi dan kekerasan.

Salah satu bentuk diskriminasi sekaligus kontroversi yang muncul di Perancis sejak dulu yaitu penggunaan hijab bagi kaum Muslim Perancis. Opini Islamofobia yang telah terbentuk dalam masyarakat Perancis mendorong masyarakat untuk terus melakukan aksi kekerasan dan diskriminasi terhadap imigran Muslim. Diskriminasi di ruang publik dialami oleh wanita Muslim utamanya dalam melamar pekerjaan. Tak mengherankan jika imigran Muslim khususnya wanita terbatas bergerak di ruang publik dan tidak memperoleh pekerjaan yang layak. Dalam laporan *Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II): Muslims - Selected Findings* dilakukan survey kepada 10.500 Muslim Perancis. Diperoleh hasil 30% imigran Muslim wanita memperoleh diskriminasi dalam melamar pekerjaan. Selain itu, 47% pria memperoleh tindak kekerasan oleh aparat keamanan dan masyarakat dikarenakan atribut dan pakaian ke-Islaman yang mereka gunakan. Mereka kerap kali diinterogasi atau memperoleh hinaan dan pelecehan (CNN, 2017).

Untuk menampung opini publik tersebut pemerintah Perancis tidak tinggal diam. Berbagai upaya sekuritisasi dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud Islamofobia pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional Perancis. Pembuatan kebijakan yang mengatur perihal penggunaan simbol dan atribut keagamaan menjadi fokus utama pemerintah Perancis. Upaya sekuritisasi terhadap imigran Muslim paling dominan dilakukan pada masa kepemimpinan Nicolas Sarkozy. Sarkozy merupakan presiden paling kontroversial dengan kebijakannya terhadap imigran Muslim. Nicolas Sarkozy mengeluarkan kebijakan luar negeri terhadap imigran melalui kebijakan France Immigration and Integration Law (*Projet de Loi relatif à l'immigration et à l'intégration*) atau yang dikenal dengan kebijakan seleksi imigran (Chou dan Baygert, 2007). Tiga poin utama dalam kebijakan tersebut yaitu (1) penyeleksian imigrasi (*immigration choisie*), (2) kewajiban integrasi (*mandatory integration*), (3) pembangunan (*co-development*) (Chou dan Baygert, 2007). Ketiga poin tersebut mengharuskan imigran menanggalkan identitas aslinya jika ingin menetap di Perancis. Pada tahun 2003, pemerintah membuat beberapa langkah untuk mereformasi proses aplikasi suaka, termasuk pengenalan konsep "negara ketiga yang aman" dan "suaka domestik". Langkah tersebut merupakan upaya untuk menyeleksi pencarian suaka bagi imigran.

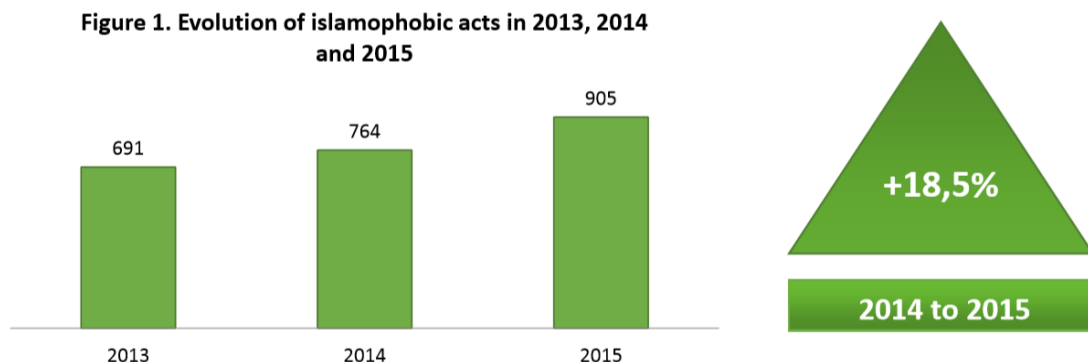
Tak berhenti, Sarkozy memperkuat undang-undang pelarangan simbol keagamaan yang dibuat oleh Jaques Chirac pada tahun 2004 yang telah menimbulkan konflik antara imigran dan masyarakat Perancis. Pada tahun 2004 Jaques Chirac mengeluarkan kebijakan pelarangan simbol-simbol agama meliputi jilbab bagi kaum Muslim, salib bagi kaum Nasrani, dan kippa bagi kaum Yahudi dan diperkuat kembali pada 2010 oleh Sarkozy dengan undang-undang anti burqa dan niqab. Opini publik berperan cukup besar dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Sentimen masyarakat Perancis terhadap imigran Muslim dan gelora anti-imigran yang dilakukan oleh Front Nasional menjadi pertimbangan tersendiri bagi Sarkozy. Populisme Marine Le-Pen dengan program *de-demonisasi* berhasil mendulang suara diikuti dengan kebangkitan Front Nasional sebagai ekstrimis sayap kanan Perancis. Selain itu, strategi Sarkozy untuk mendulang suara pada pemilu tahun 2012 melawan Francois Hollande dan Marine Le-Pen menjadi alasan kebijakan diskriminasi imigran dibuat oleh Sarkozy. Opini Islamofobia yang telah digelorakan oleh berbagai pihak dan diterima oleh masyarakat Perancis rupanya ditangkap Sarkozy sebagai strategi yang dituangkan dalam kebijakan imigrasi Perancis.

Kebijakan diskriminatif yang dibuat oleh pemerintah Perancis mendorong masyarakat yang mulanya hanya berpikiran Islamofobik namun dengan adanya kebijakan tersebut publik seakan mendapat pembenaran atas tindakan diskriminasi terhadap imigran Muslim di Perancis. Sebagai contoh, sebelum adanya kebijakan anti burqa dan niqab oleh Nicolas Sarkozy masyarakat Perancis hanya memberikan subjektivitas negatif terhadap imigran Muslim. Namun, setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut masyarakat seakan memperoleh justifikasi untuk mendiskriminasi perempuan Muslim yang mengenakan burqa dan niqab dengan melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal.

Menurut data *Commission Nationale Consultative des Droits de L'Homme* (CNCDH) atau komisi mengenai hak asasi manusia tahun 2015 iklim diskriminasi meningkat selama lima tahun terakhir. Survey yang dilakukan CNCDH praktik keagamaan Islam merupakan penghalang bagi kehidupan sosial masyarakat Perancis. Sekitar 47% beropini negatif terhadap Muslim di Perancis sedangkan hanya 26% yang beropini positif. Data

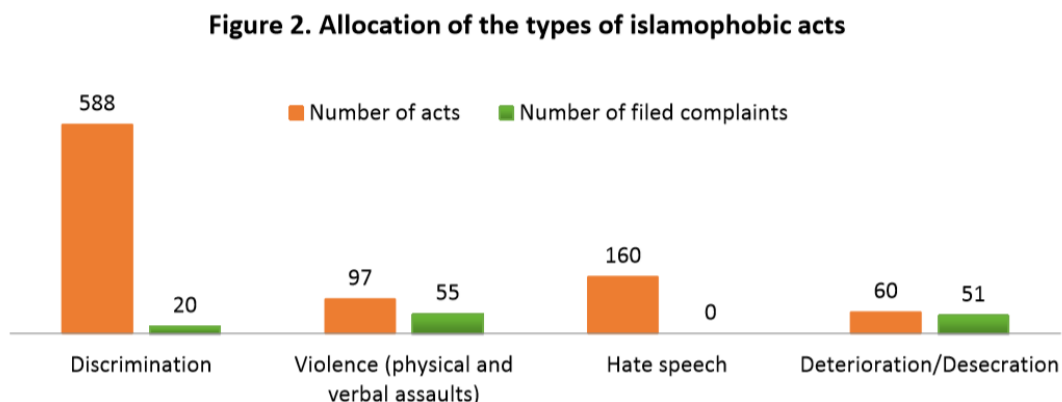


tersebut menunjukkan bahwa opini publik mengenai Muslim meningkatkan praktik Islamofobia di Perancis (CNCDH, 2015).



Sumber: Laporan Tahunan CCIF Tahun 2015

Laporan tahunan CCIF tahun 2015 melaporkan fenomena Islamofobia terbagi dalam empat tindakan yaitu diskriminasi, kekerasan fisik maupun verbal, ujaran kebencian, dan penistaan agama. Diskriminasi yang dilakukan terhadap Muslim mencapai 588 kasus namun hanya 20 yang dilaporkan. 97 tindakan kekerasan fisik maupun verbal namun hanya 55 laporan yang terdata. 160 ujaran kebencian dan tidak ada satupun kasus yang dilaporkan. Sedangkan penistaan agama berjumlah 60 kasus yang terlaporkan hanya 51 kasus (CCIF, 2015). CCIF melaporkan ada 676 tindakan diskriminasi tercatat sepanjang tahun 2018. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2017 hanya sebanyak 446 kasus. Tindakan kekerasan tersebut terdiri dari 20 serangan fisik, 568 tindakan diskriminasi, dan 88 penghinaan dan ujaran kebencian (The Local Fr, 2019).



Sumber: Laporan Tahunan CCIF tahun 2015

Kini, pada masa pemerintahan Presiden Emmanuel Macron dikeluarkan kebijakan pengetatan masa tunggu imigran yang mulanya 120 hari menjadi 90 hari. Melalui kebijakan tersebut terlihat bahwa Perancis memberi perhatian tersendiri pada imigran khususnya imigran Muslim yang dari masa ke masa terus mengalami peningkatan. Pada November 2019 pengusuran terhadap 1.600 imigran dilakukan Macron sebagai langkah tegas Perancis

terhadap imigran dan sebagai upaya memberi jawaban atas tuntutan publik terhadap penanganan imigran yang dinilai kurang efektif pada masa pemerintahannya (The New York Times, 2019). Berbagai tindakan Islamofobik berupa kekerasan dan diskriminasi disimpulkan sebagai konsekuensi dari kebijakan diskriminatif terhadap imigran Muslim di Perancis. Peningkatan angka fenomena Islamofobia dinilai sebagai bentuk penerimaan publik akan narasi anti-imigran dan Islamofobia yang digelorakan oleh figur politik dan kelompok penekan Perancis.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini membuktikan bahwa Islamofobia berhasil dipolitisasi oleh kelompok penekan dan figur politik Perancis sehingga, pemerintah Perancis melakukan upaya sekuritisasi melalui pembuatan kebijakan diskriminatif terhadap imigran khususnya imigran Muslim. Politisasi Islamofobia oleh infrastruktur politik dilakukan dengan upaya deklarasi terus menerus menggelorakan anti-Islam sehingga sentimen Islamofobia diterima oleh seluruh masyarakat Perancis dan membentuk opini publik. Opini publik yang terbentuk dalam masyarakat yaitu Islamofobia diekspresikan dalam berbagai tindakan diskriminasi dan kekerasan sehingga mendorong pemerintah melakukan upaya sekuritisasi berupa pembuatan kebijakan imigrasi. Teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Ole Waever dan Barry Buzan dinilai kurang memadai dalam penelitian ini sebab terdapat variabel lain yaitu opini publik yang mempengaruhi upaya sekuritisasi pemerintah Perancis terhadap imigran Muslim selain variabel figur politik dan kelompok penekan. Penelitian ini membuktikan bahwa pembuatan suatu kebijakan luar negeri dalam suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh pimpinan suatu negara namun, opini publik yang dibentuk oleh infrastruktur politik berhasil mempengaruhi kebijakan luar negeri Perancis. Kuatnya opini publik yang diwujudkan melalui ekspresi kekerasan dan kebencian terhadap kelompok sosial tertentu mampu mempengaruhi pemerintah melakukan upaya sekuritisasi. Artinya, proses sekuritisasi menurut Ole Waever dan Barry Buzan bersifat *top-down* tidak selalu relevan dengan penelitian ini. Terdapat variabel lain yang mempengaruhi pemerintah melakukan upaya sekuritisasi sehingga alur proses sekuritisasi berawal dari opini publik bermuara pada langkah pemerintah melakukan sekuritisasi yang terkristalisasi ke dalam kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri.

## REFERENSI

- Arighi, Y. D. E. (2017) *Media dan islamophobia di Perancis (Studi Kasus: Propaganda F de Souche)*. Bandung: Universitas Katholik Parahyangan.
- Balzacq, T. et al. (2015) What kind of theory – If any – Is securitization?, *SAGE Journal of International Relations*, (1): 96-96
- BBC News (2015) Pertemuan Uni Eropa Tak Hasilkan Kesepakatan. Tersedia pada: [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150915\\_dunia\\_pengungsi\\_eu](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150915_dunia_pengungsi_eu). (Diakses 15 Mei 2019).
- Carvalho, J. (2017). The French mainstream and the front national's electoral fortunes. In Pontus Odmalm e Eve Hepburn (Ed.), *The European mainstream and the populist radical right*. London: Routledge.
- CCIF. (2000). *The Collective Against Islamophobia in France*. Tersedia pada: <http://www.islamophobie.net/en/> (Diakses: 31 Maret 2019).
- CCIF. (2016). *Launch of A Class Action Against The Statements of Minister Laurence Rossignol*. <http://www.islamophobie.net/en/>. (Diakses 5 April 2019)
- CCIF (2015) *CCIF Report 2015*
- CCIF (2016) *CCIF Report 2016*
- CCIF. (2016). *Launch of A Class Action Against The Statements of Minister Laurence Rossignol*. <http://www.islamophobie.net/en/>. (Diakses 5 April 2019).
- CNN.com. (2015). Sentimen Anti-Islam di Perancis Meningkat 110 Persen. Tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150121141219-13426240/sentimen-anti-islam-di-perancis-meningkat-110-persen>. (Diakses: 3 April 2019).
- DW. (2015). Islamophobia in France More Prevalent, Political Scientist Argues. Tersedia pada: <https://www.dw.com/en/islamophobia-in-france-more-prevalent-political-scientist-argues/a-18175794-0>. (Diakses 4 April 2019).
- Eurostatistic (2019) *Key figures on Europe — Statistics illustrated — 2019 edition*.
- Guardian.com. (2017). Muslim Population in Some EU Countries Could Triple, Says Report, Guardian.com. Tersedia pada: <https://www.theguardian.com/world/2017/nov/29/muslim-population-ineurope-could-more-than-double> (Diakses: 6 April 2019).
- Harvard Divinity School. (2010). *Le Front National*. Tersedia pada: <https://rlp.hds.harvard.edu/faq/le-front-national> (Diakses 11 April 2019).
- Mol, C. Van der Valk, H. (2016). *Integration Processes and Policies in Europe*. IMISCOE Research Series. Springer, Cham, (1): 131–160.
- Pabottingi, M. et al. (2008). *Potret Politik Kaum Muslim di Perancis dan Kanada*. Makassar: Pemandani.
- Rosyidin, M. (2015) *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Rou, M. J. (2019). *Revisiting Securitization : The ‘ Constructivist Turn ’ in Security Studies*. New York: Routledge.
- Skidmore, D. (1999). *Security: A New Framework for Analysis* By Barry Buzan, Ole Weaver, and Jaap de Wilde. Boulder, CO: Lynne Rienner, *American Political Science Review*, 93(4): 1010–1011.

- Telegraph.co.uk. (2016). Thousands March in Anti-Islam Pegida Rallies Across Europe. Tersedia pada: <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/12144357/Thousands-march-in-anti-Islam-Pegida-rallies-across-Europe.html>. (Diakses 2 Februari 2019).
- The Local Fr. (2019). What is the French anti-Islamophobia march and why is it controversial? Tersedia pada: <https://www.thelocal.fr/20191107/what-is-the-french-anti-islamophobia-march-and-why-is-it-controversial>. (Diakses 4 Maret 2019)
- The New York Times.com. (2019). France Has Millions of Muslims. Why Does It Import Imams?. Tersedia di: <https://www.nytimes.com/2019/01/28/opinion/france-islam-imamsimport-algeria.html> (Diakses 1 Maret 2019).